



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 73 TAHUN 2018
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia perlu dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Satuan Tugas Pengawasan Tenaga Kerja Asing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SATUAN TUGAS PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengawasan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Satgas Pengawasan TKA dengan keanggotaan, terdiri atas:

- 1 . Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2 . Sekretariat Kabinet;
- 3 . Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan HAM;
- 4 . Kementerian Ketenagakerjaan;
- 5 . Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6 . Kementerian Dalam Negeri;
- 7 . Kementerian Luar Negeri;
- 8 . Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 9 . Kementerian Perindustrian;
- 10 . Kementerian Perhubungan;
- 11 . Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 12 . Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat
- 13 . Kementerian Kesehatan;
- 14 . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 15 . Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 16 . Kementerian Agama;
- 17 . Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 18 . Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 19 . Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- 20 . Kementerian Pariwisata;
- 21 . Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 22 . Badan Intelijen Negara;

- 23 . Badan Koodinasi Penanaman Modal; dan
- 24 . Badan Intelijen Strategis TNI.

- KEDUA : Satgas Pengawasan TKA mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma hukum dalam penggunaan TKA sesuai kewenangan masing-masing.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Satgas Pengawasan TKA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Ketua Satgas Pengawasan TKA melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Ketenagakerjaan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan Satgas Pengawasan TKA dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjangkan apabila diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2018
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Rudy Salahuddin	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, Kemenko Perekonomian	Pengarah
2.	Satya Bhakti Parikesit	Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet	Pengarah
3.	Agustina Murbaningsih	Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet	Pengarah
4.	Hery Sudarmanto	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan	Pengarah
5.	Sugeng Priyanto	Dirjen Binawasnaker, Kementerian Ketenagakerjaan	Pengarah
6.	Ronny Franky Sompie	Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM	Pengarah
7.	Maruli Apul Hasoloan	Dirjen Binapenta dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan	Pengarah
8.	Iswandhi Hari	Direktur Bina Penegakan Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan	Ketua
9.	Bernawan Sinaga	Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek, Kementerian Ketenagakerjaan	Wakil Ketua I
10.	Zaeroji	Direktur Wasdakim, Kementerian Hukum dan HAM	Wakil Ketua II
11.	Herman Prakoso Hidayat	Direktur PNK3, Kementerian Ketenagakerjaan	Sekretaris

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
12.	Wisnu Pramono	Direktur PPTKA, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
13.	Budiman	Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
14.	Yulius	Asdep Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian	Anggota
15.	Gamal Haryo Putro	Asdep Bidang Intelejen Keamanan, Pengamanan Obvitnas dan Bimbingan Masyarakat, Kemenko Politik dan Hukum dan HAM	Anggota
16.	Zanariah	Direktur SUPD IV, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
17.	M. Adnan	Kasubdit Pengawasan Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
18.	Didik Eko Pujiyanto	Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri	Anggota
19.	Munir Ahmad	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
20.	Bambang Susigit	Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
21.	Ida Nuryatin Finahari	Direktur Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
22.	Soerjaningsih	Direktur Pembinaan Program Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
23.	Willem Petrus Riwu	Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
24.	Eko S.A. Cahyanto	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Perindustrian	Anggota
25.	Wahyu Adji H	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan	Anggota
26.	Eko Rudianto	Direktur Penanganan Pelanggaran, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
27.	Tini Martini	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
28.	Ober Gultom	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Anggota
29.	Diono Susilo Yuskasran	Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri, Kementerian Kesehatan	Anggota
30.	Suharti	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
31.	Dian Wahyuni	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
32.	Bunyamin Maftuh	Direktur Karier dan Kompetensi SDM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Anggota
33.	Ari Hendrarto Saleh	Kepala Biro SDM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Anggota
34.	Anwaruddin Ambary	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
35.	Selamata Sembiring	Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
36.	Bastian	Kepala Biro Hukum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Anggota
37.	Wahyu Setyawan	Kabag PUU, Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Anggota
38.	Sanusi	Kepala Biro Humas dan Hukum, Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Anggota
39.	Yusup Suparman	Kabag Hukum, Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Anggota
40.	Wisnu Bawatarunajaya	Asdep Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga, Kementerian Pariwisata	Anggota
41.	Djoko Mulyono	Direktur Keamanan Negara Baintelkam, Kepolisian Negara Republik Indonesia	Anggota
42.	Suryo Widodo	Direktur 32, Badan Intelijen Negara	Anggota
43.	Wisnu Wijaya Soedibjo	Direktur Wilayah 3, Badan Koodinasi Penanaman Modal	Anggota
44.	Suryamargono	Direktur D, Badan Intelijen Strategis TNI	Anggota
45.	Erick Simanjuntak	Paban D-4 Dit. D, Badan Intelijen Strategis TNI	Anggota

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI